



Legislatif dan Eksekutif Setujui Lima Raperda

BENGKAYANG-- DPRD Kabupaten Bengkayang menggelar sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap lima Raperda kabupaten Bengkayang. Rapat yang turut dihadiri Bupati Bengkayang tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Bengkayang, kemarin siang.

Adapun, paripurna pengambilan keputusan terhadap lima Raperda ini telah disetujui bersama baik Legislatif dan Eksekutif. Persetujuan atas lima Raperda Kabupaten Bengkayang ini sudah melewati berbagai tahapan, mulai dari nota pengantar bupati sampai pada pembahasan di Pansus DPRD.

Lima Raperda yang disetujui menjadi Perda Kabupaten Bengkayang ini, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG), Raperda tentang perusahaan umum daerah Bumi Sebalu Mandiri, Raperda tentang perusahaan perseroan daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkayang, serta Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang cara pemilihan, pemberhentian, dan pelantikan Kades.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menilai dengan dibentuknya kelima Perda tersebut nantinya dapat memberikan dampak yang baik bagi daerah, terutama dalam menata kembali aturan yang ada.

Bupati Darwis menjelaskan, isi dan poin penting dari masing-masing Raperda yang disebutkan. Seperti, Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG). Dimana kata dia, terhadap bangunan gedung perlu dilakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Hal tersebut diperlukan agar proses PBG dapat berlangsung secara tertib dan terwujudnya keandalan bangunan gedung yang sesuai fungsi, dan tentunya berlandaskan kepastian hukum yang berlaku.

Kemudian terkait Raperda

tentang perusahaan umum daerah Bumi Sebalu Mandiri, dirinya menilai bahwa usaha menciptakan pembangunan daerah yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing harus dilakukan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, dia menilai serangkaian pembangunan berkelanjutan di bidang perekonomian daerah dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan kemanfaatan umum untuk mendorong dan meningkatkan produk domestik.

Kemudian, dia juga menjelaskan Raperda tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Dimana tujuan didirikannya BUMD adalah untuk menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Sebagaimana kehadiran BUMD dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang maupun jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat masyarakat sesuai kondisi yang diper-

lukan.

Kemudian menyangkut Raperda tentang perusahaan Perseroan daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri merupakan langkah Pemda dalam pendirian BUMD dengan prinsip dasar menghidupkan usaha masyarakat, untuk dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usaha melalui tata kelola perusahaan yang baik.

"Dalam hal ini, peran BUMD juga difungsikan untuk dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing," ucapnya.

Lebih jauh, Bupati Darwis juga menjelaskan, terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pemberhentian, dan pelantikan kades. Menurutnya, pelaksanaan demokrasi di tingkat desa perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen, termasuk masyarakat dan Pemda, khususnya dalam memilih pimpinan yang

benar-benar merupakan pilihan rakyat.

Terakhir, Bupati Darwis juga memaparkan isi dari Raperda kelima tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bengkayang.

Dimana dia menjelaskan bahwa diperlukan adanya penyesuaian dan peruba-

han terhadap pembentukan dan besaran perangkat daerah, yang tentunya tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah, dan beban kerja perangkat daerah.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus berharap, setelah disetujui bersama

kelima Raperda tersebut, kepala daerah akan segera menerbitkan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda.

"Kita berharap agar perda tersebut dapat membantu dan mempermudah pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan semua stakeholder pada bidang yang dimaksud," harap pria yang akrab disapa Esi tersebut. (Sig)